

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam pergaulan internasional saat ini isu-isu tradisional dalam hubungan internasional telah tergantikan oleh isu-isu seperti isu ekonomi, hak asasi manusia, lingkungan, dan sosial budaya yang secara langsung hal-hal tersebut dapat menyebabkan berubahnya pola-pola hubungan internasional dan wajah politik global.

Dalam hubungan internasional yang merupakan suatu sistem hubungan antar negara yang berdaulat dalam pergaulan internasional menjadikan kegiatan diplomasi sebagai suatu elemen utama bagi suatu negara dalam menentukan eksistensi didalam pergaulan hubungan internasional. Diplomasi merupakan proses politik untuk memelihara kebijakan luar negeri suatu pemerintah dalam mempengaruhi kebijakan dan sikap pemerintah negara lain.<sup>1</sup> Diplomasi kekinian juga tidak hanya menyangkut kegiatan politik saja tetapi juga menyangkut kegiatan multi-dimensional yang digunakan dalam situasi dan lingkungan apa pun dalam hubungan antar bangsa.<sup>2</sup>

Seiring meningkatnya jumlah isu-isu kontemporer saat ini maka kebutuhan akan pemecahan masalah juga meningkat, hal ini menjadikan diplomasi sebagai kendaraan utama untuk menjawab setiap kekacauan, kesenjangan, kesalahan

---

<sup>1</sup> Sumaryo Suryokusumo, 2004, *Praktik Diplomasi*, STIH IBLAM : Jakarta, Hlm.1

<sup>2</sup> *Ibid.* Hlm. 3

komunikasi yang terjadi diantara negara-negara di dunia. Sebagai contoh pada tahun 1980-an, diplomasi dijadikan sebagai alat bagi “Negara-negara Selatan” untuk menuntut “Negara-negara Utara” atas ketimpangan ekonomi yang terjadi antara Utara-Selatan, dimana tuntutan tersebut diharapkan agar terjadi redistribusi ekonomi dan transfer teknologi yang lebih baik dari Utara ke Selatan. Gema tuntutan ini kemudian menjadi berkurang intensitasnya setelah terjadi diplomasi diantara negara-negara utara dengan negara-negara selatan dengan saling mengintensifkan kerjasama di kedua belah pihak. Peristiwa ini merupakan cikal bakal aktivitas diplomasi ekonomi yang menggantikan hubungan konfrontatif pada dekade sebelumnya menjadi kerjasama, periode ini juga ditandai dengan maraknya aktivitas diplomasi multilateral, khususnya yang membahas topik-topik kerjasama ekonomi dan perdagangan.<sup>3</sup>

Globalisasi membawa pola-pola interaksi dalam hubungan internasional yang berujung pada upaya agar dunia menjadi terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Globalisasi menjadi alasan dan faktor utama bagi berbagai negara-negara didunia untuk saling bekerjasama. Hal ini didasarkan pada saling bergantung dan saling membutuhkannya tiap-tiap negara terhadap negara lain, baik itu dalam sumber daya alam, energi, informasi, teknologi, maupun perdagangan. Globalisasi kemudian lambat laun membawa semacam penyatuan yang semakin dekat antara negara-negara dan masyarakat-masyarakat didunia yang disebabkan oleh pengurangan biaya transportasi dan komunikasi yang begitu besar dan

---

<sup>3</sup> Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi antara Teori & Praktik*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm.62.

meruntuhkan berbagai penghalang artifisial bagi arus barang, jasa, modal, pengetahuan dan (dalam jumlah yang sedikit) orang-orang diperbatasan.<sup>4</sup>

Sifat hubungan internasional yang bercorak transnasional ini memang menjadi kecenderungan dunia setelah munculnya era globalisasi. Kondisi demikian memacu negara untuk mengembangkan pola politik luar negerinya supaya dapat terjalin kerjasama dengan berbagai negara. Kerjasama internasional tersebut telah meluas dan tidak hanya sebatas antara pemerintah negara saja, namun mulai melibatkan pemerintah daerah suatu negara. Apalagi sejak diterapkannya otonomi daerah oleh pemerintah pusat, hal ini makin mendesak pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama antar daerah dengan daerah dalam negeri dan luar negeri. Berkah otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat mengundang aktor baru yaitu Pemerintah Daerah atau Kota dalam interaksi hubungan internasional. Otonomi daerah semakin membuka gerbang bagi dunia luar kepada *Local Government to Local Government*, bahkan *Person to Person* untuk berinteraksi dan berdiplomasi secara langsung.

Kehadiran Pemerintah Lokal (*Local Government*) didalam arena internasional sebagai aktor baru di era globalisasi saat ini ditandai dengan banyaknya perjanjian-perjanjian internasional yang dilakukan antar pemerintah-pemerintah lokal atau daerah diberbagai penjuru dunia. Berawal dari hal tersebut munculah jaringan-jaringan *Sister City* diberbagai penjuru dunia yang hingga saat ini semakin meningkat mulai dari kota-kota dan provinsi-provinsi dari negara-negara maju hingga negara-negara berkembang, bahkan negara-negara kecil.

---

<sup>4</sup>Stiglitz Joseph, *Globalisasi dan Kegagalan Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional*, (Terjemahan Ahmad Lukman) (Jakarta: PT Ina Publikatama), hlm.12.

Kerjasama *Sister City* dalam sejarah pertama kali terjadi di Benua Eropa, antara Keighley, Yorkshire Barat (sekarang berada di Inggris) dengan Poix-dunord, Perancis pada tahun 1920 setelah berakhirnya perang dunia pertama.<sup>5</sup> Kerjasama *Sister City* di Indonesia sudah mulai muncul pada tahun 1960. Dengan berbagai motivasi di dalam awal munculnya kegiatan kerjasama tersebut, namun yang menjadi faktor utama adalah karena banyak didorong oleh adanya persamaan, misalnya seperti kedua kota yang menjalin kerjasama *Sister City* adalah sama-sama ibukota negara, persamaan kedudukan dan status administrasi dan persamaan ukuran luas wilayah dan fungsi.

Terkait dengan berkembangnya hubungan luar negeri tersebut maka pemerintah Indonesia dalam rangka mendukung penyelenggaraan hubungan luar negeri yang lebih terarah, terpadu dan berlandaskan kepastian hukum maka pemerintah Indonesia memberlakukan dua hukum, yakni Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-undang nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kedua perangkat hukum tersebut dimaksud merupakan landasan hukum yang mengikat bagi pemerintah pusat dan pelaku hubungan luar negeri lainnya termasuk unsur-unsur daerah dalam melaksanakan hubungan luar negeri.<sup>6</sup>

Dengan penjelasan diatas penulis mendeskripsikan bahwa diplomasi adalah kendaraan utama yang hingga saat ini telah mengalami peningkatan baik dari segi cara, bentuk, dan terutama aktor-aktor yang berperan didalamnya. Dengan hadirnya pemerintah lokal dalam kancah dunia hubungan internasional saat ini

---

<sup>5</sup> Dalam <http://publikasi.umy.ac.id/files/journals/8/articles/775/public/775-1532-1-PB.pdf>, diakses pada tanggal 23 Januari 2014

<sup>6</sup> Jemmy Rumengan, "Perspektif Hukum dan Ekonomi atas Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah", dalam *Jurnal Hukum Internasional*, Vol 6, No.2, (2009), hlm. .239

membuktikan bahwa aktor-aktor dalam hubungan internasional telah mengalami perubahan. Salah satu pemerintah lokal yang turut serta dalam kancah dunia hubungan internasional adalah Kota Bandung.

Kota Bandung mengadakan hubungan kerjasama *Sister City* sejak tahun 1960 dengan Kota Braunschweig, Jerman, sehingga menjadi kota pertama sekaligus kota terlama dalam penyelenggaraan kerjasama *Sister City* di Indonesia. Seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi, Kota Bandung memperluas jalinan hubungan kerjasama dengan kota-kota lain di luar negeri seperti Kota Forth Worth – Texas, Amerika Serikat; Kota Suwon, Republik Korea; Yingkou dan Liuzhou, Republik Rakyat China.<sup>7</sup> Kota Bandung telah memiliki kerjasama *Sister City* sebagai jembatan bagi potensi masyarakat Kota Bandung untuk berkembang dalam masyarakat dunia dan menjadikan penting bagi pengembangan kegiatan Pemerintah Kota Bandung dengan masyarakat dunia.<sup>8</sup>

Pada perkembangannya kerjasama *Sister City* diharapkan dapat menjadi sebuah media yang menjembatani perbedaan kedua kota dan menciptakan kesempatan untuk tukar menukar pengetahuan dan pengalaman pengelolaan pembangunan bidang-bidang yang dikerjasamakan, mendorong tumbuhnya prakarsa dan peran aktif pemerintah daerah kota, masyarakat dan swasta, mempererat persahabatan pemerintah dan masyarakat kedua belah pihak serta kesempatan untuk tukar menukar kebudayaan dalam rangka memperkaya kebudayaan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Pemerintah Kota Bandung, *Buku Panduan Sister City Bandung*(Bandung), hlm. 9.

<sup>9</sup> Laporan Kunjungan Delegasi Kota Bandung ke Kota Suwon, Republik Koreapada tanggal 5-10 Oktober 2011

Salah satu kerjasama *Sister City* Kota Bandung adalah menjalin hubungan *Sister City* dengan Kota Suwon, Republik Korea. Berawal dari inisiatif pertama Pemerintahan Kota Suwon yang berkeinginan mengadakan Mitra Kota dengan Kotamadya Bandung, yang disampaikan melalui Kedutaan Besar RI di Seoul dan Dirjen HELN (Hubungan Ekonomi dan Luar Negeri) Departemen Luar Negeri untuk disampaikan kepada Menteri Luar Negeri RI, kerjasama tersebut mencakup Bidang Ekonomi, Perdagangan, Pariwisata, Investasi, Iptek, Pendidikan, Kebudayaan, Kesejahteraan, Pemuda dan Olah raga.<sup>10</sup>

Niatan baik yang berawal dari Pemerintah Kota Suwon yang berupa penawaran kerjasama dengan pemerintah Kota Bandung, merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Suwon dalam mengembangkan kerjasama dengan Pemerintah Kota Bandung yang diharapkan tidak semata-mata hanya menjalin hubungan persahabatan yang saling pengertian diantara pemerintah kota tetapi juga sebagai upaya untuk menggalang kerjasama yang saling menguntungkan dalam berbagai aspek. Beberapa aspek yang ditangani oleh masing-masing pemerintah kota mengalami kesamaan, dalam hal ini kesamaan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, Kota Bandung merupakan kota yang memiliki bermacam jenis kebudayaan<sup>11</sup> dan merupakan sentral dari beberapa aspek seperti pendidikan dan industri di negaranya.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> *Op. Cit. Buku Panduan Sister City Bandung*, hlm. 36.

<sup>12</sup> Bandung dengan lebih dari 25 sekolah tinggi, dan pertumbuhan industri tekstil dan industri kreatif, sangat cocok dengan kondisi perkuliahan dan daerah bisnis yang kuat. Sedangkan Kota Suwon adalah Kota Pusat Pendidikan yang merupakan rumah bagi 14 universitas dan rumah bagi perusahaan besar Samsung dengan anak perusahaan Samsung Electric, Samsung LED, Samsung SDIOp. *Cit.*.

Munculnya peluang dan tantangan dengan melihat poin-poin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak didalam perjanjian kerjasama, menjadi bahan dan dasar bagi kedua pemerintah kota untuk membuat dan mengatur strategi kebijakan yang akan diterapkan masing-masing, khususnya pemerintah Kota Bandung dalam menjalankan kerjasama *Sister City* tersebut. Disamping itu penulis mengaitkan *Multytrack Diplomacy* dalam frase kerjasama *Sister City* Kota Bandung dengan Kota Suwon sebagai pokok analisi dalam penulisan skripsi ini. Atas alasan tersebut penulis mengangkat judul: ***“Dampak Kerjasama Sister City Kota Bandung dengan Kota Suwon (Republik Korea) Terhadap Perkembangan Pendidikan dan Kebudayaan Di Kota Bandung (Periode 2008-2013)”***

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pemaparan penulis diatas, dalam penelitian ini terdapat beberapa masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan. Adapun permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya kerjasama *Sister City* Kota Bandung dengan Kota Suwon?
2. Bagaimana strategi dan kebijakan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan Indonesia, khususnya Kota Bandung?
3. Sejauh mana manfaat yang diperoleh dari kerjasama *Sister City* dalam bidang pendidikan dan kebudayaan Kota Bandung dengan Kota Suwon?

## 1. Pembatasan Masalah

Agar tidak terjadi pembahasan yang meluas karena berbagai fenomena terjadi diseperti masalah penelitian dan begitu panjangnya waktu yang berjalan sejak kerjasama *Sister City* Kota Bandung dengan Kota Suwon berlangsung sedangkan kemampuan peneliti baik dalam pencarian data dan ketersediaan data terbatas, untuk itu diperlukan suatu pembatasan masalah agar lebih fokus dan mencapai target penelitian maka dari itu peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu kerjasama *Sister City* Kota Bandung dengan Kota Suwon dari tahun 2008-2013 dalam bidang pendidikan dan kebudayaan dan dampaknya terhadap perkembangan pendidikan dan kebudayaan di Kota Bandung.

## 2. Perumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, maka penulis menarik sebuah rumusan masalah, yaitu: **“Bagaimana dampak dari implementasi kerjasama *Sister City* Kota Bandung dengan Kota Suwon terhadap peningkatan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan kedua kota?”**

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana kerjasama *Sister City* Kota Bandung dengan Kota Suwon.



- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan perjanjian kerjasama *Sister City* Kota Bandung dengan Kota Suwon.
- c. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam memaksimalkan MoU *Sister City* Kota Bandung dengan Kota Suwon khususnya dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat bagi Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kota Suwon agar dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam melihat peluang dan tantangan yang ada di dalam Program Kerjasama *Sister City* untuk meningkatkan hubungan baik, pembangunan, pertukaran informasi, kerjasama diantara kedua belah pihak.
- b. Diharapkan Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut terhadap semua Program *Sister City* di Indonesia sebagai salah satu diplomasi yang memiliki peluang dan tantangan bagi pemerintah daerah untuk menjalin kerjasama internasional dengan kota-kota lain diberbagai penjuru dunia.

## D. Kerangka Teoritis dan Hipotesis

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan sumber landasan untuk menganalisis masalah yang akan diteliti. Penulisan skripsi ini menggunakan kerangka pemikiran guna membantu dalam memahami dan menganalisa permasalahan yang berlandaskan terori-teori hubungan internasional dari pakar yang kompeten yang tentunya sesuai dengan masalah yang diteliti.

Isu globalisasi saat ini telah berkembang diseluruh negara di dunia. Dimana hampir semua orang mendapatkan akses untuk melakukan interaksi dan komunikasi dengan orang lain yang berada di negara lain. **Kennedy** dan **Ohen** menyebutkan “globalisme adalah suatu kesadaran dan pemahaman baru bahwa dunia adalah satu”. **Giddens** menegaskan bahwa “kebanyakan dari kita sadar bahwa sebenarnya diri kita turut ambil bagian dalam sebuah dunia yang harus berubah tanpa terkendali yang ditandai dengan selera dan rasa ketertarikan akan hal yang sama, perubahan dan ketidakpastian, serta kenyataan yang mungkin terjadi”. Sejalan dengan itu, **Peter Drucker** menyebutkan “globalisasi sebagai zaman transformasi sosial”.<sup>13</sup>

Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa

---

<sup>13</sup> Dedy Prabowo. “Globalisasi dan Pengaruhnya Pada Hubungan Internasional”. Dalam <http://kajian-ilmuinformasi.blogspot.com/2011/07/globalisasi-dan-pengaruhnya-pada.html>. Diakses pada 20 November 2012 dalam Yossi Meidiana, “PERANAN ASEAN SCOUT ASSOCIATION FOR REGIONAL (ASARC) TERHADAP REVITALISASI GERAKAN PRAMUKA INDONESIA” Skripsi FISIP-HI UNPAS tidak diterbitkan, 2013, hlm.16.

lain yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan berbsama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut **Krisna**:

“Sebagai proses, globalisasi berlangsung melalui dua dimensi dalam interaksi antar bangsa, yaitu dimensi ruang dan waktu. Ruang makin dipersempit dan waktu makin dipersingkat dalam interaksi dan komunikasi pada skala dunia. Globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan lain-lain”<sup>15</sup>

Dari pengertian diatas, dapat dimaknai bahwa globalisasi hadir mengisi setiap kehidupan seperti, politik, ekonomi, sosial-budaya dan didalam globalisasi interaksi antara bangsa-bangsa mengalami perkembangan yang signifikan.

Sistem negara merupakan cara tertentu dalam mengatur kehidupan politik dimuka bumi yang memiliki akar sejarah yang dalam. Terdapat sistem negara atau sistem quasi-negara pada waktu dan tempat yang berbeda, dan dibelahan dunia yang berbeda. Sejak abad kedelapan belas hubungan antar negara-negara merdeka disebut “Hubungan Internasional” yang saat ini hubungan internasional merupakan studi tentang sistem negara global dari berbagai macam perspektif ilmiah.<sup>16</sup>

Hubungan internasional merupakan suatu ilmu yang interdisipliner, dimana memiliki hubungan dengan ilmu-ilmu lainnya dalam usaha mengkaji suatu permasalahan yang muncul yang kemudian menjadi fenomena baru. Perkembangan ilmu hubungan internasional saat ini tidak hanya mengacu pada

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Robert Jackson dan George Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional* (Terjemahan Dadan Suryadipura) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2005), hlm.. 2-3

hubungan antar negara saja, melainkan mencakup permasalahan yang ada didalamnya seperti perkembangan suatu daerah atau kota yang melibatkan kerjasama antar kota lintas batas negara yang bersifat kompleks, seperti yang dikatakan oleh **Mohtar Mas'ood** (1990) bahwa:

**“Hubungan internasional itu sangat kompleks karena didalamnya terlibat bangsa-bangsa yang masing-masing berdaulat sehingga memerlukan mekanisme yang lebih rumit daripada hubungan antar kelompok manusia didalam suatu negara. Ia juga sangat kompleks karena setiap hubungan itu melibatkan berbagai segi lain yang koordinasinya tidak sederhana”.**

Dari pernyataan Mas'ood tersebut dapat disimpulkan betapa rumitnya hubungan internasional karena ini adalah suatu interaksi bukan saja antar negara-bangsa yang berdaulat melainkan suatu interaksi yang memiliki aspek-aspek lainnya yang harus diperhatikan.

Sebagai tambahan dalam konteks Hubungan Internasional kontemporer menurut **T. May Rudy** bahwa:

**“Hubungan internasional pada masa lampau berfokus kepada kajian mengenai perang dan damai...masih beritik berat kepada hubungan politik yang lazim disebut sebagai *“High Politic”*. Sedangkan hubungan internasional kontemporer selain tidak lagi hanya memfokuskan perhatian dan kajiannya kepada hubungan politik yang berlangsung antar negara atau antar bangsa yang ruang lingkungannya melintasi batas-batas negara, juga telah mencakup peran dan kegiatan yang dilakukan oleh aktor-aktor bukan negara (*Non-state Actors*)”.**<sup>17</sup>

Hubungan internasional bukan hanya tentang hubungan antar negara tetapi juga tentang hubungan transnasional, yaitu hubungan antara masyarakat, kelompok-kelompok, dan organisasi-organisasi yang berasal dari negara

---

<sup>17</sup> T. May Rudy, *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-masalah Global: isu, Konsep, Teori dan Paradigma*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003), hlm. 1. Dalam Noer Utami P.M.S, “KERJASAMA EKONOMI ASEAN+3 DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA” Skripsi FISIP-HI Unpas Tidak Diterbitkan, 2007, hlm. 13.

berbeda.<sup>18</sup> Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (*Cooperation*), persaingan (*Competition*), dan pertentangan (*Conflict*). Tentu yang diharapkan berlangsung secara adil dan saling menguntungkan, bagaimana mencegah dan menghindari konflik, serta bagaimana mengubah kondisi-kondisi persaingan (kompetisi) dan pertentangan (konflik) menjadi kerjasama.<sup>19</sup>

Definisi dari Politik Internasional dari **DR. Anak Agung Banyu Perwita** dan **DR. Yanyan Mochamad Yani** adalah

**Politik Luar Negeri sendiri merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional. Suatu komitmen yang pada dasarnya merupakan strategi dasar untuk mencapai tujuan baik dalam konteks dalam negeri dan luar negeri serta sekaligus menentukan keterlibatan suatu negara di dalam isu-isu internasional atau lingkungan sekitarnya.**<sup>20</sup>

Sudah terbukti bahwa tidak satupun negara yang dapat dan mampu hidup sendiri, serta hampir setiap negara mempunyai masalah masing-masing yang tidak dapat diselesaikan sendiri. Dalam permasalahan tersebut kadang kala dibutuhkan hubungan atau bantuan dari negara lain untuk memenuhi kepentingan nasional dari suatu negara dan hal tersebut terkait dengan kebijakan luar negeri suatu negara. Kebijakan Luar Negeri adalah strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> *Loc. Cit*, hlm. 144.

<sup>19</sup> Charles A. McClelland, *Ilmu Hubungan Internasional: Teori dan Sistem*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), hlm. 27.

<sup>20</sup> DR. Anak Agung Banyu Perwita dan DR. Yanyan Mochamad Yani, "*Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*", Pt. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, hlm. 47.

<sup>21</sup> *Ibid.* Hlm. 49

Setiap kebijakan luar negeri yang diambil oleh pemerintah Indonesia, pasti berdasarkan kepentingan nasional Republik Indonesia. Adapun pengertian Kepentingan Nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah:

**“Kepentingan nasional adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.**<sup>22</sup>

Pendapat tersebut sejalan dengan pengertian kepentingan nasional menurut **Suffri Yusuf**:

**“Kepentingan nasional diperjuangkan oleh suatu bangsa atau negara untuk diperjuangkan dalam rangka ketertiban internasional dimana kepentingan nasional dibentangkan kepada rakyat sebagai doktrin-doktrin dan dalam suatu negara, kepentingan nasional dapat berubah sewaktu-waktu, situasi dan kondisi”.**<sup>23</sup>

Berdasarkan teori diatas dapat dikatakan bahwa salah satu cara untuk mewujudkan kepentingan nasional adalah dengan melakukan suatu kerjasama. Kerjasama, atau kooperasi adalah praktik seseorang atau kelompok yang bekerja di khalayak dengan tujuan atau kemungkinan metode yang disetujui bersama secara umum.<sup>24</sup>

Hubungan antar negara atau kerjasama antar negara dalam masyarakat internasional seringkali didasari oleh adanya persamaan diantara negara-negara tersebut, seperti persamaan keadaan geografis, ideologi, dan juga kepentingan politik dan ekonomi yang mengikat dalam hubungan kerjasama negara-negara

---

<sup>22</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>23</sup> Suffri Yusuf, Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri: Sebuah analisis dan uraian tentang pelaksanaannya, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), hlm. 77.

<sup>24</sup> “Kerjasama” dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Kerjasama>, diakses pada 24 Maret 2014.

tersebut. Pengertian kerjasama internasional itu sendiri menurut **Koesnadi Kartasasmita** adalah:

**“Kerjasama dalam masyarakat internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat terdapatnya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksnya kehidupan-kehidupan manusia dalam bermasyarakat internasional. Kerjasama internasional terjadi karena *national understanding* dimana mempunyai corak dan tujuan yang sama, keinginan yang didukung untuk kondisi internasional yang saling membutuhkan, kerjasama itu didasari oleh kepentingan yang saling membutuhkan, kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama di antara negara-negara, namun kepentingan itu tidak identik”.**<sup>25</sup>

Terdapat landasan hukum dari penjelasan mengenai kerjasama internasional di Indonesia yang diperkuat oleh Undang-undang sebagai berikut:

1. UU No. 37/1999 tentang hubungan luar negeri

Pasal 1 (1) : Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara.

2. UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Pasal 5: Lembaga Negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non-departemen, di tingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan menteri.

---

<sup>25</sup>Koesnadi Kartasasmita, Organisasi dan Administrasi Internasional (Bandung: Fisip Universitas Padjadjaran Press, 1983), hal. 83 dalam Liberty Eduardo Zwageri Mozes, “Kerjasama Indonesia – Cina Dalam Promosi dan Pemasaran Pariwisata Bersama Terhadap Peningkatan Kunjungan Wisatawan Cina Ke Indonesia”, Skripsi Fisip-HI Unpas tidak diterbitkan, 2013, hal. 12.

Kerjasama Internasional dalam aplikasinya dapat dibagi menjadi tiga bagian, antara lain:

1. **Kerjasama Intra-Regional;** merupakan suatu kerjasama yang dilakukan atau dilaksanakan oleh negara-negara yang berada dalam satu kawasan (*region*), seperti di Asia Tenggara yaitu ASEAN, di Timur-Tengah yaitu Liga Arab, di Amerika Utara dengan NAFTA dan Tran Atlantik NATO (*North Atlantic Treaty Organization*).
2. **Kerjasama Inter-regional;** Merupakan suatu kerjasama yang dilakukan atau dilaksanakan diantara negara-negara di kawasan lain, seperti kerjasama antara Eropa dengan Jepang.
3. **Kerjasama Multilateral dan Bilateral;** Kerjasama Multilateral adalah kerjasama antara dua negara atau lebih, sedangkan kerjasama Bilateral adalah kerjasama yang hanya dilakukan oleh dua negara.<sup>26</sup>

Dalam kaitan ini pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh Kota Bandung dengan Kota Suwon adalah Kerjasama Bilateral. Menurut **Kusumohamidjojo** kerjasama bilateral adalah:

**“Suatu bentuk kerjasama diantara negara-negara yang berdekatan secara geografis ataupun yagn jauh diseberang lautan dengan sasaran utama untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kesamaan politik kebudayaan dan struktur ekonomi”.**<sup>27</sup>

Dalam ruang lingkup sosial, ekonomi, politik dan budaya, pelaksanaan kerjasama luar negeri oleh Pemerintah Daerah, penerapannya merupakan jawaban dari adanya tuntutan globalisasi yang sudah seharusnya lebih memberdayakan daerah dengan cara, diberikan kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Desentralisasi merupakan simbol atau tanda adanya kepercayaan Pemerintah Pusat kepada daerah.

---

<sup>26</sup> T. may Rudy dalam Skripsi Noer Utami P.M.S, *Op .Cit*, hlm. 14.

<sup>27</sup> Budiono Kusumohamidjojo, Hubungan Internasional-Kerangka Studi Analitis, (Jakarta: Bina Cipta, 1987), hlm. 3.



Menyangkut hubungan kerjasama luar negeri oleh Pemerintah Daerah telah berlaku pula Undang-undang Nomor 32/2004 tentang Pemda Pasal 42 dengan pemaparan sebagai berikut:

UU No. 32/2004 tentang Pemda (Pasal 42) DPRD mempunyai tugas dan wewenang memberikan, antara lain:

1. Pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
2. Persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pemerintah Pusat juga dapat menugaskan kepada daerah mengenai urusan-urusan pemerintahan tertentu dalam rangka tugas pembantuan yang disertai pembiayaan, saran dan prasarana, serta sumber daya manusia. Penugasan tersebut dibebani kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan pertanggung jawabannya kepada Pemerintah (Pasal 13 UU No. 22 Tahun 1999).

Penjelasan dari Undang-undang tersebut didukung oleh pendapat dari **T.**

**May Rudi** didalam buku Teori, Etika, dan Kebijakan Hubungan Internasional:

**“Pola kerjasama melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur yang jelas dan lengkap serta diharapkan akan diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah-pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara berbeda”.**<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> T. May Rudy dalam Jonray Simangunsong , “Kerjasama Internasional Criminal Police Organization (ICPO-INTERPOL) dengan POLRI dalam Pelaksanaan Ekstradisi Antara Indonesia dan Negara Yang Belum Memiliki Perjanjian Ekstradisi (Khususnya Indonesia-Singapura), Skripsi HI-UNPAS tidak diterbitkan, 2013, hlm.

Berdasarkan pada kewenangan aturan atau legalitas Pemerintah Kota Bandung yang berlaku dalam hal ini yaitu otonomi daerah yang bersumber pada Undang-undang No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.

Bentuk kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung dan Kota Suwon adalah *Sister City*. Menurut **Pemerintah Kota Bandung** Kerjasama *Sister City* adalah suatu bentuk kerjasama yang melibatkan kota disuatu negara dengan kota dinegara lainnya yang bertujuan untuk meningkatkna rasa persaudaraan yang erat dan saling menguntungkan.<sup>29</sup>

Sejalan dengan pengertian diatas **Andi Oetomo** dari Kelompok Keahlian Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Kebijakan Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Badung dalam *Apa itu Sister City?* Berpendapat bahwa *Sister City* dalam pengertiannya sering juga disebut *Twining City* atau dalam Bahasa Indonesia Kota Kembar, dimana kerjasama antar kota bersifat luas, yang disepakati secara resmi dan bersifat jangka panjang.

Kerjasama *Sister City* antara Kota Bandung dengan Kota Suwon yang penyelenggaraannya harus memperhatikan hal-hal tertentu. Sesuai dengan Perda Kota Bandung Nomor: 12 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan kerjasama daerah pasal 21 (1) harus memperhatikan:

---

<sup>29</sup> Pemerintah Kota Bandung. *Loc. Cit.*

- a. Kesetaraan status administrasi;
- b. Kesamaan karakteristik;
- c. Kesamaan permasalahan;
- d. Upaya saling melengkapi; dan
- e. Peningkatan hubungan antar masyarakat.

Berdasarkan peraturan diatas Kerjasama Sister City terbentuk karena adanya Persamaan kedudukan dan status administrasi, Persamaan ukuran luas wilayah dan fungsi, Persamaan karakteristik sosio-kultural dan topografi kewilayahan, Persamaan permasalahan yang dihadapi, dan Komplementaritas antara kedua pihak dengan tujuan untuk membangun hubungan kerjasama dalam pertukaran kunjungan pejabat atau pengusaha, yang nantinya akan menimbulkan kerjasama dalam hubungan barang dan jasa.

Didalam kerjasama *Sister City* Kota Bandung dengan Kota Suwon terdapat bidang-bidang yang disetujui dalam kerjasama. Menurut **Donal Bell Souder & Shanna Bredel** dalam *A Study of Sister City Relations*, bidang yang meliputi Kerjasama Sister City terbagi kedalam:

1. Budaya, dalam konteks kerjasama budaya ditujukan untuk memahami keanekaragaman budaya yang berbeda sehingga dapat terjalinnya pemahaman mengenai latar belakang budaya, sehingga dapat meningkatkan kerjasama yang lebih mendalam antar Kota dalam hubungan internasional, yang biasanya melibatkan unsur seni musik, pertunjukan budaya, dan hal lainnya yang menyangkut kebudayaan.

2. Akademik, dalam bidang akademik biasanya melibatkan pengiriman duta/ delegasi dari suatu Kota terhadap Kota lainnya yang ditunjukkan untuk mempromosikan dan mempelajari budaya lain, untuk mempererat hubungan yang lebih mendalam.
3. Pertukaran informasi, dalam hal ini ditunjukkan untuk menanggulangi suatu kesamaan permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat terselesaikan dan pengembangan hal ini dapat ditunjukkan untuk pembangunan kota yang lebih baik.
4. Ekonomi, merupakan bidang yang terpenting dalam kerjasama Sister City, hal ini berlandaskan pada tujuan peningkatan perdagangan antar Kota, sehingga konteks kerjasama terjalin lebih mendalam.

Dari beberapa bidang kerjasama yang dilakukan oleh Kerjasama *Sister City* Kota Bandung dengan Kota Suwon adalah bergerak dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan menurut **Ki Hajar Dewantara** merupakan proses pembudayaan yakni suatu usaha memberikan nilai-nilai luhur kepada generasi baru dalam masyarakat yang tidak hanya bersifat pemeliharaan tetapi juga dengan maksud memajukan serta memperkembangkan kebudayaan menuju ke arah keluhuran hidup kemanusiaan.<sup>30</sup> Konsep pendidikan jelas dituangkan dalam UU Pendidikan RI Nomor 20 Tahun 2003. Bab 1, pasal 1, Butir 1 yaitu Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik

---

<sup>30</sup> Haryanto, Pengertian Pendidikan Menurut Ahli. Dalam [http://belajarpsikologi.com/pengertian-pendidikan-menurut-ahli/diakses pada 27 Februari 2014](http://belajarpsikologi.com/pengertian-pendidikan-menurut-ahli/diakses%20pada%2027%20Februari%202014)

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan.<sup>31</sup>

Saat ini kebudayaan merupakan salah satu unsur pokok dalam suatu negara yang menjadi identitas bangsa. **Ki Hajar Dewantara** mendefinisikan kebudayaan sebagai kemenangan atau hasil perjuangan hidup, yakni perjuangan terhadap 2 kekuatan yang kuat dan abadi, alam, zaman. Kebudayaan tidak pernah mempunyai bentuk yang abadi, tetapi terus menerus berganti-gantinya alam dan zaman (Dewantara: 1994). **Ruth Benedict** melihat kebudayaan sebagai pola pikir dan berbuat yang terlihat dalam kehidupan sekelompok manusia dan yang membedakannya dengan kelompok lain.

Menurut pendapat **E.B Taylor** dapat diketahui bahwa budaya atau peradaban itu bersifat kompleks karena mencakup pengetahuan, perilaku, seni,

---

<sup>31</sup>Tambahan Lembaran Negara RI No.4301 Pendidikan Sistem Pendidikan Nasional. Warga Negara. Masyarakat. Pemerintah. Pemerintah Daerah. Dalam [www.inherent-dikti.net/files/sisdiknas.pdf](http://www.inherent-dikti.net/files/sisdiknas.pdf), diakses pada 27 Februari 2014.

moral, hukum, adat, dan setiap kemampuan lain dan kebiasaan yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat.<sup>32</sup>

Sebagai tambahan Menurut **A. L Kroeber** dan **Clyde**

**Kluchohn:**

*“Culture consist of pattern, explicit and implicit, of and for behavior acquired and transmitterd by symbols, constitutive and distinctive achievement of human groups, including their embodiments in artifact the essential core of culture consist of traditional (i.e., historically derived and selected) ideas and especially their attached values; cultures systems may, on the one hand, be considered as products of action, on the other as conditioning elements of further action”.*<sup>33</sup>

Kebudayaan terdiri dari pola-pola, yang tersurat dan tersirat. Dari dan untuk kelakuan yang diperoleh dan diteruskan dengan simbol-simbol, yang terdiri dari unsur-unsur prestasi kelompok-kelompok manusia, termasuk perwujudannya berupa benda-benda, inti pokok kebudayaan terdiri dari ide-ide terutama nilai-nilai tradisional di dalamnya (yaitu yang diperoleh dan diseleksi secara historis); sistem-sistem kebudayaan, di satu pihak, dianggap sebagai produk tingkah laku, dan di lain pihak sebagai unsur-unsur yang membentuk tingkah laku

Unsur-unsur kebudayaan meliputi semua kebudayaan di dunia, baik yang kecil, maupu bersahaja dan terisolasi, maupun yang besar, kompleks, dan dengan jaringan hubungan yang luas. Menurut **Koentjaraningrat** konsep kebudayaan di dunia mempunyai tujuh unsur universal,<sup>34</sup> yaitu:

---

<sup>32</sup> E.B Taylor dalam “International Encyclopedia of The Social Sciences: Volume 3”,(The Macmillan Company & The free Press, New York), hlm. 527.

<sup>33</sup> A. L Kroeber dan Clyde Kluchohn dalam *Ibid.* hlm. 528.

<sup>34</sup> Koentjaraningrat dalam “ Pengantar Ilmu Antropologi”, (PT. Rineka Cipta, Jakarta) hlm. 165

1. Bahasa
2. Sistem Teknologi
3. Sistem Mata Pencaharian
4. Organisasi
5. Istem Pengetahuan
6. Religi
7. Kesenian

Guna memenuhi kepentingan daerah antara kedua belah pihak kerjasama tersebut dilakukan dengan menggunakan kendaraan utama yang hingga saat ini telah mengalami peningkatan baik dari segi cara bentuk, dan terutama aktor-aktor yang berperan didalamnya yaitu diplomasi. **Barston** mendefinisikan diplomasi sebagai manajemen hubungan antar negara atau hubungan antar negara dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya. Negara, melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor lain berusaha menampaikan, mengkoordinasikan, dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau lebih luas, yang dilakukan melalui korespondensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, lobby, kunjungan, dan aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait.<sup>35</sup>

**Jack C, Plano** dan **Roy Olton** menguraikan tentang diplomasi sebagai praktek pelaksanaan hubungan antar negara melalui perwakilan resmi. Diplomasi dapat mencakup seluruh proses hubungan luar negeri, pembentukan kebijakan luar negeri, serta pelaksanaannya.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Sir Ernest Satow, *A Guide to Diplomatic Practice*, (Longman Grees & Co, NY, 1992), hlm.1.dalam Sukawarsini Djelantik, hlm.4.*Op. Cit.*

<sup>36</sup> Jack C, Plano dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional*, (Jakarta: Gramedia, 1999), hlm. 201.

Berdasarkan jenisnya diplomasi dibagi menjadi dua, salah satunya adalah diplomasi bilateral. Menurut **G.R Berridge**, seorang profesor politik internasional dari Universitas Leicester, Inggris dalam bukunya *Diplomacy, Theory and Practice* menyatakan bahwa “Diplomasi bilateralisme mengacu pada hubungan politik dan budaya yang melibatkan dua negara”. Sampai saat ini, kebanyakan diplomasi internasional dilakukan secara bilateral. Contohnya, penandatangan perjanjian (traktat), tukar menukar Duta Besar, dan kunjungan kenegaraan.

Bentuk-bentuk aktivitas diplomasi yang multi jalur sebagai hasil dari interaksi aktor-aktor diplomasi modern yang sangat fleksibel dan “bebas” merupakan bagian dari diplomasi publik yang mempunyai pengertian sebagai upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara terhadap publik sendiri maupun masyarakat internasional untuk memperbaiki citra. Salah satunya melalui diplomasi budaya.

Diplomasi budaya dapat didefinisikan sebagai diplomasi dengan menggunakan kegiatan-kegiatan budaya seperti pengiriman misi kesenian ke negara lain untuk menimbulkan dan memperoleh kesan atau citra baik. Diplomasi dengan menggunakan sarana budaya tidak mesti harus dengan budaya kuno atau lama.<sup>37</sup> Hal ini diperkenalkan oleh S.L Roy dengan istilah “*Diplomacy by Cultural Perfomance*”.<sup>38</sup> Keunikan dan keindahan kebudayaan suatu negara sering membawa ketertarikan tersendiri bagi masyarakat internasional yang tidak jarang menimbulkan decak kagum yang pada akhirnya membawa pada rasa ingin tahu,

---

<sup>37</sup> Harwanto Dahlan, “*Beberapa Istilah Diplomasi*”, dalam <http://istayn.staff.uns.ac.id/files/2011/09/beberapa-istilah-diplomasi.doc>, diakses pada 12 Maret 2014.

<sup>38</sup> *Ibid*, diakses pada 12 maret 2014



pengetahuan baru yang kemudian mengubah paradigma bagi masyarakat internasional yang melihatnya. Sehingga hal ini lambat laun akan membentuk sebuah citra yang positif, sikap yang lunak, serta menampilkan sisi yang akrab sebuah negara dimata masyarakat.

Ditengah globalisasi dan modernisasi teknologi, diplomasi merupakan salah satu sarana yang tepat dalam menjalankan strategi politik luar negeri suatu negara., Sarana diplomasi budaya dipilih karena *style* diplomasi ini sangat fleksibel, efisien, memiliki efek jangka panjang, dan tidak kaku, dimana pun dan siapa pun dapat melakukannya tanpa harus melibatkan para diplomat resmi. Diplomasi budaya terbukti mampu meredam konflik dan ketegangan yang terjadi dalam politik internasional juga mampu membawa nuansa keakraban dan “kemesraan” dalam hubungan luar negeri suatu negara.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mencoba memberikan asumsi yang merupakan pemikiran sementara sebagai berikut :

1. Dalam usaha mewujudkan kepentingan nasional masing-masing negara, ada cara-cara tertentu yang harus ditempuh oleh sebuah negara. Cara-cara tertentu yang dilakukan dalam rangka merealisasikan kepentingan nasional sebuah negara itu dapat melalui sebuah interaksi antara dua negara atau lebih yang saling menguntungkan dan dapat memenuhi kepentingannya, proses interaksi tersebut biasa disebut sebagai kerjasama.
2. Kerjasama internasional merupakan hubungan antar negara atau kerjasama antar negara dalam masyarakat internasional seringkali didasari oleh adanya persamaan seperti persamaan keadaan geografis, ideologi, dan juga

kepentingan politik dan ekonomi yang mengikat dalam hubungan kerjasama negara-negara tersebut. Dalam kaitannya saat ini kerjasama tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat saja melainkan juga dilakukan oleh pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengambil contoh kerjasama internasional yang lazim dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu kerjasama *Sister City* antara Kota Bandung dan Suwon.

3. Dalam pelaksanaan kerjasama *Sister City* Kota Bandung dan Kota SUwon dalam bidang pendidikan dan kebudayaan Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan strategi dan kebijakan yang berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di Republik Indonesia.
4. Kerjasama *Sister City* yang dilakukan oleh Kota Bandung dan Kota Suwon yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan memberikan manfaat diantaranya adalah meningkatnya hubungan baik antar kedua kota.

## 2. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran dan permasalahan diatas, maka penulis mencoba membuat dan merumuskan hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai dugaan awal atau jawaban sementara terhadap permasalahan, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

**“Jika kerjasama *Sister City* Kota Bandung dengan Kota Suwon dalam bidang pendidikan dan kebudayaan diimplementasikan dengan baik maka bidang pendidikan dan kebudayaan kedua kota akan berkembang”**

### 3. Operasional Variabel dan Indikator

Untuk membantu dalam menganalisa penelitian lebih lanjut, maka penulis membuat definisi Operasional Variabel tentang konsep hipotesis, yaitu:

**Tabel 1.1**

#### Operasional Variabel dan Indikator

Variabel (Konsep Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
Variabel bebas : Kerjasama <i>Sister City</i> Kota Bandung dengan Kota Suwon dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.	1. Adanya persetujuan kerjasama (MoU) antara Kota Bandung dengan Kota Suwon dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.	1. Ditandatanganinya <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) kerjasama <i>Sister City</i> Kota Bandung dengan Kota Suwon pada 25 Agustus 1997 dan didalamnya terdapat kerjasama dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.
Variabel Terikat : Meningkatkan perkembangan pendidikan dan kebudayaan di Kota Bandung.	1. Adanya program-kerjasama <i>Sister City</i> dalam bidang pendidikan dan kebudayaan antara Kota Bandung dengan Kota Suwon.	1. Pertukaran Pemuda yang difasilitasi oleh <i>Siwon Youth Foundation</i> . Sumber: <a href="http://klik-galamedia.com/">http://klik-galamedia.com/</a> 2. Bantuan dari Universitas Kyonggi dalam bidang pendidikan berupa alat tulis dan dana bantuan untuk

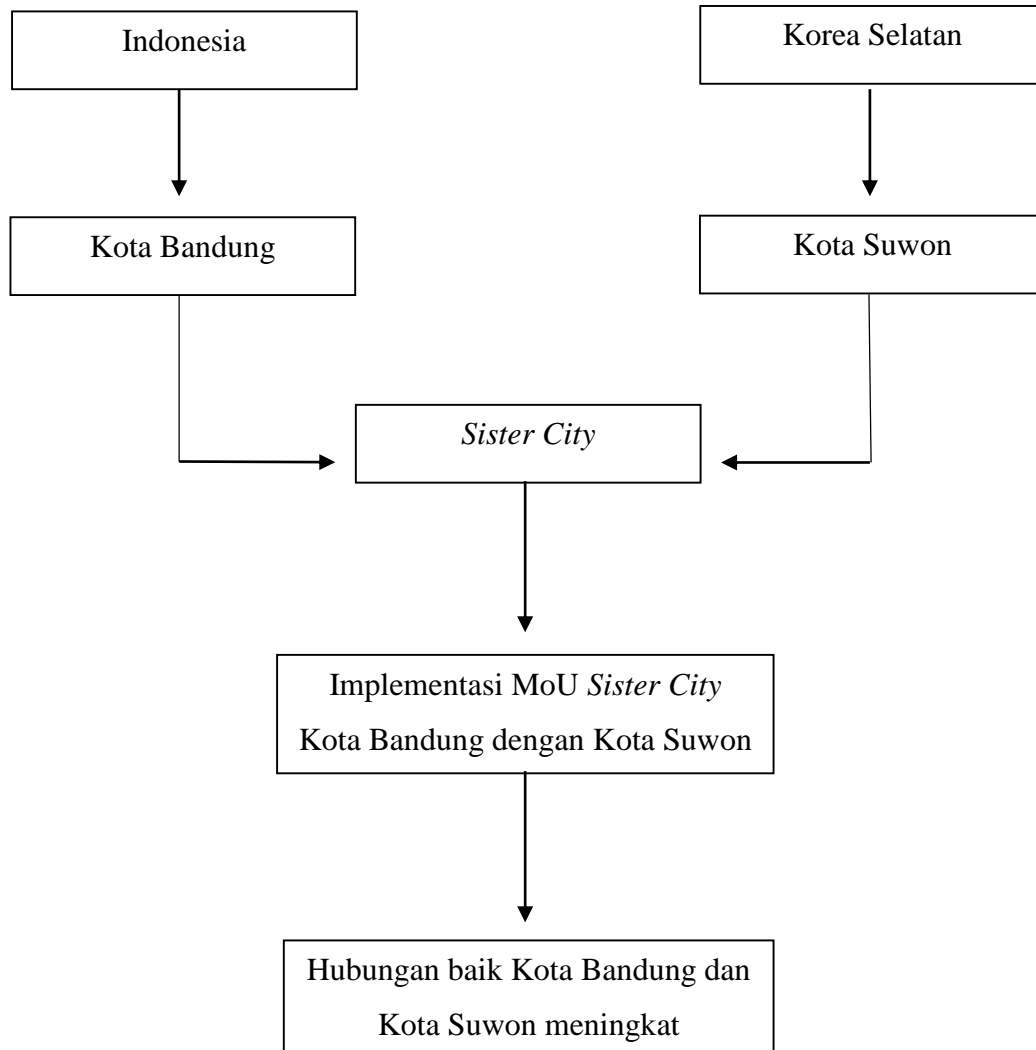
<p>Variabel Terikat :</p> <p>Meningkatkan perkembangan pendidikan dan kebudayaan di Kota Bandung.</p>	<p>2. Kerjasama Universitas Pasundan dengan Universitas Kyonggi, Suwon.</p>	<p>fasilitas PAUD di Kelurahan Sukamulya.          Sumber: Wawancara dengan Han Hadrian S.Ip, Staf Fungsional Umum Bag. Kerjasama Daerah Pemkot Bandung dan <a href="http://www.publikanews.com">http://www.publikanews.com</a></p> <p>1. Ditandatanganinya <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) kerjasama Universitas Pasundan Dengan Universitas Kyonggi pada tanggal 1 Juli 2013.</p> <p>2. Kerjasama Universitas Pasundan dengan Universitas Kyonggi dalam program S2 untuk mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Pasundan          Sumber: Wawancara dengan Dr. Yusman, Wakil Dekan 1 Fakultas Teknis Universitas Pasundan.</p>
---	---	--

<p>Variabel Terikat :</p> <p>Meningkatkan perkembangan pendidikan dan kebudayaan di Kota Bandung.</p>	<p>3. Kerjasama Universitas Kristen Maranatha dengan Universitas Hanshin, Suwon.</p> <p>4. Diberikannya kesempatan bagi masing-masing kota untuk memperkenalkan kebudayaan masing-masing.</p>	<p>1. Dibukanya Kelas Bahasa Korea Di Universitas Maranatha sejak tahun 2011 hingga sekarang Sumber: <a href="http://news.maranatha.edu/?p=865">http://news.maranatha.edu/?p=865</a></p> <p>1. Tampilnya delegasi kebudayaan Kota Bandung di Kota Suwon dalam acara <i>Hwaseong Cultural Festival 2013</i> dan tampilnya Tim Kebudayaan dari Universitas Kyonggi di Kota Bandung dalam <i>Dago Car Free Day</i> Sumber: Wawancara dengan Han Hadrian S.Ip, Staf Fungsional Umum Bag. Kerjasama Daerah Pemkot Bandung</p>
---	---	--

#### 4. Skema Kerangka Teoritis

**Gambar 1**

**Skema Kerangka Teoritis**



## E. Tingkat Analisis, Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

### 1. Tingkat Analisis

Penggunaan tingkat analisis dalam studi hubungan internasional penting dilakukan untuk memudahkan memilih dan memilah masalah yang paling layak ditekankan atau yang dianalisis, serta untuk menghindari kemungkinan melakukan kesalahan metodologis yang disebut *fallacy of composition* dan *ecological fallacy*.<sup>39</sup> Ada tiga tingkat analisis yang umum digunakan dalam studi hubungan internasional, yaitu: individu dan kelompok, Negara-Bangsa, dan sistem regional dan global.<sup>40</sup>

Untuk menetapkan jenis hubungan tingkat analisis harus dilihat dari hubungan antara unit analisis dengan unit eksplanasi, ada 3 unit yang bisa dilihat:

- a. Analisa reduksionis, yaitu unit eksplanasi pada tingkat yang lebih rendah.
- b. Unit Korelasionalis, yang unit eksplanasinya dan unit analisisnya pada tingkat yang sama.
- c. Analisa Induksionalis, yang unit analisisnya pada tingkatan yang lebih tinggi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisa induksionalis, dimana kerja sama *Sister City* Kota Bandung dan Kota Suwon lebih tinggi tingkat analisisnya dari perkembangan pendidikan dan kebudayaan di Kota Bandung.

---

<sup>39</sup> Mohtar Mas' oed, "Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan metodologi", LP3ES, Jakarta, 1990, hlm.208-209.

<sup>40</sup> Untuk melihat jenis-jenis isu dan fenomena hubungan internasional/politik internasional masuk pada tingkat analisis yang mana sebaiknya baca buku Mohtar mas' oed, Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisa dan Teorisasi ( Yogyakarta : PAU, Studi sosial UGM, 1989), juga bukunya A. Valendana Teori of Internasional Politik (Kampur, India:Vikas Publishing co. Ltd, 1996), Khususnya bab Level of Analisis.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur dan cara dalam pengumpulan dan analisis agar kesimpulan yang ditarik memenuhi persyaratan berpikir sistematis. Untuk memberikan kemudahan dalam melakukan penelitian, penulis akan menggunakan penelitian yaitu:

### a. Metode Penelitian Deskriptif

Metode penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa dan kejadian yang ada pada masa sekarang. Metode ini merupakan metode yang berusaha mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan data yang kemudian diajukan dengan menganalisa data tersebut atau menganalisa fenomena tersebut serta suatu metode dalam meneliti suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

### b. Metode Penelitian Historis

Metode ini digunakan untuk mengungkapkan peristiwa atau kejadian pada masa lalu dan membuat interpretasi data sesuai dengan makna yang terkandung didalamnya, sehingga memperoleh suatu generalisasi yang berguna untuk memahami kenyataan sejarah dan membandingkannya dengan keadaan sekarang serta dapat meramalkan keadaan yang akan datang. Metode historis juga merupakan metode penyelidikan yang kritis terhadap keadaan-keadaan, perkembangan-perkembangan, pengalaman dimasa lalu, yang masih ada kaitannya dan mempunyai hubungan yang berkesinambungan dan terus berlangsung saat ini terhadap konteks permasalahan yang dihadapi berdasarkan sumber data sekunder.



### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah studi kepustakaan (studi literatur), yaitu teknik mengumpulkan data berdasarkan penelaahan/penelusuran literatur. Pada penelitian ini, penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku, arsip-arsip, artikel, jurnal, majalah, wawancara, serta di internet berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

## **F. Lokasi dan Lama Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan mengambil lokasi di beberapa perpustakaan atau instansi yang dianggap relevan dengan tujuan memperoleh data dan informasi yang lengkap dan akurat mengenai masalah yang akan diteliti, yaitu:

- a. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan  
Jl. Lengkong Besar No. 68, Bandung
- b. Balai Kota Pemerintah Kota Bandung  
Jl. Wastukencana No. 2, Bandung
- c. Rektorat Universitas Pasundan  
Jl. Dr. Setiabudhi No. 193

## **2. Lama Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu enam bulan terhitung sejak bulan Desember 2013 sampai Mei 2014 dan untuk lebih lengkap mengenai tahapan dari penelitian yang dilakukan tertera pada tabel berikut :



## G. Sistematika Penulisan

Secara umum, penulisan skripsi ini terbagi dalam empat bab. Pembahasan yang terkandung dalam bab satu dengan bab-bab lainnya saling berkaitan satu dengan yang lain. Sehingga pada akhirnya akan membentuk suatu karya tulis yang runtut dan sistematis. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

**BAB I** Dalam bab 1 ini membahas tentang pendahuluan, berisikan sub-sub yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah. Tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian, lokasi dan tabel lama penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

**BAB II** Pada Bab II ini akan membahas uraian atau informasi mengenai tema yang dijadikan variabel bebas,. Yaitu sejarah terjalannya kerjasama *Sister City* antara Kota Bandung dengan Kota Suwon, sejarah Kota Bandung, Sejarah Kota Bandung, Sejarah *Sister City* Kota Bandung dengan Kota Suwon.

**BAB III** Dalam Bab III ini berisi Uraian atau informasi mengenai masalah yang menjadi variabel terikat yaitu konsep yang hendak dijelaskan kejadiannya dan terjadi akibat dari variabel lain. Dalam penyusunan skripsi ini yang menjadi variabel terikat adalah perkembangan pendidikan dan budaya di Kota Bandung dan Kota Suwon.

**BAB IV** Dalam Bab IV ini berisi pembahasan, menguraikan serta menjawab hipotesis dan indikator-indikator penelitian yang dideskripsikan dalam data.

**BAB V** Dalam Bab V ini akan memaparkan beberapa kesimpulan atau hasil yang telah dilakukan.